



**Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar**

2018-2023



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS SOSIAL



Jl. Kapten Mulyadi, tegalarum, Cangakan, Kabupaten Karanganyar



www.dinsos.karanganyarkab.go.id



Telp. (0271) 495031 Fax (0271) 494043



dinsoskra@gmail.com



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129), maka guna menjaga sinergitas dan konsistensi perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA SRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Srategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Dinas Sosial adalah salah satu unsur pelaksana program dari pemerintah di bidang Sosial yang dalam menjalankan kegiatannya berkewajiban membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Program Kerja Tahunan dan Jangka Menengah guna mendukung keberhasilan Visi, Misi Bupati dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah salah satu faktor penting yang sangat menentukan suatu kebijaksanaan pelaksanaan program pemerintah yang akan memperjelas arah dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Kedinasan, sehingga mempermudah menentukan arah kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah ditentukan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Semoga Ranwal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ini dapat memberikan manfaat, masukan serta pertimbangan untuk mengambil kebijakan.

Karanganyar, September 2021

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

MARNO, S.ST., MP.

Pembina

NIP. 19650401 198902 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4-8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN OPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	8-11
2.2. Sumber Daya OPD	13-14
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	14-18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	19-20
BAB. III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD	21-23
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23-27
3.3. Telaah Renstra K/L	28-32
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32-33
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	33-34
BAB. IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	35-36
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37-38
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	39-70
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB. VIII PENUTUP	72

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi	12
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
	2.2	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	14
	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar	18
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	22
	3.2	Telaah Visi, Misi dan Program KDH	27
	3.3	Telaah Renstra Kementerian Sosial	30
	3.4	Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi	31-32
	3.5	Telaah RT RW dan KLHS	33
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kab. Karanganyar	36
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	37-38
Tabel	6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	41-70
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten	71
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar Urusan Sosial	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat secara cepat, efektif dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam hal kewenangan dalam penanganan PMKS maka penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penanganan langsung di luar Panti kecuali Eks Napza dan HIV/AIDs. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan perencanaan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut 'Rencana Strategis' atau populer disebut Renstra.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran lebih lanjut

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten Karanganyar.

Rencana strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya, serta merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan perencanaan strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Karanganyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders. Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabel.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Kedudukan renstra perangkat daerah adalah merupakan rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Yuridis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Periode 2018-2023 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 110).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2023) baik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Memberikan pedoman bagi perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar yang mengarah kepada Tujuan, Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, fungsi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan RPJMD dan dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.3 Maksud dan Tujuan

berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.4 Sistematika Penulisan

menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ditujukan untuk menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Sosial (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

menguraikan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten

Karanganyar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang Pelayanan Teknis yang mempunyai uraian tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian tatalaksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan Barang/Jasa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
- c. Pengelolaan bantuan sosial;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial, dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan penyantunan anak

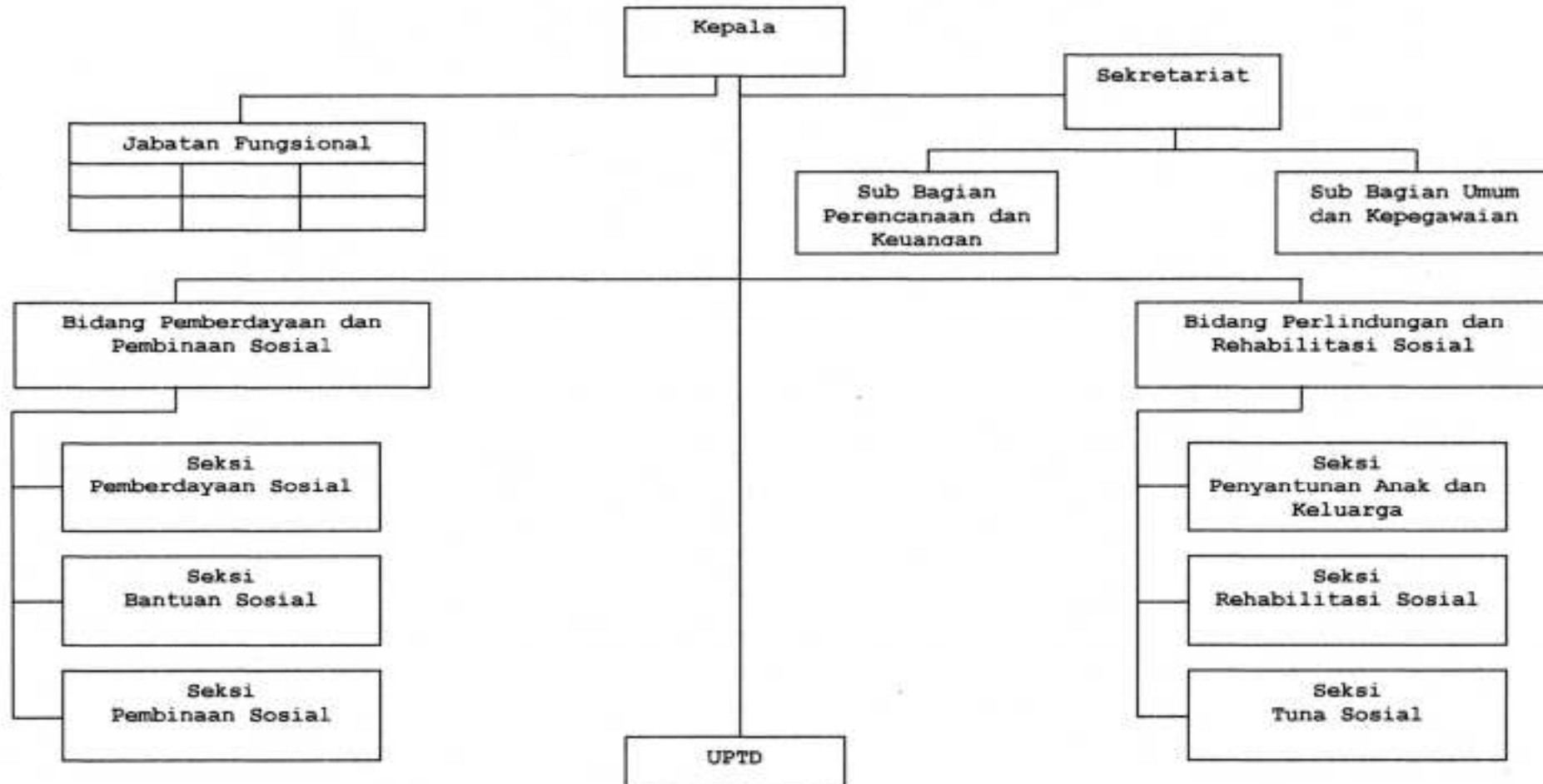
dan keluarga;

- b. Pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan penyantunan anak dan keluarga;
- c. Penanganan permasalahan sosial;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan rehabilitasi sosial, dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 53 (lima puluh Tiga) orang Pegawai, terdiri dari 37 (Tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil dan 16 (enam belas) Tenaga Kontrak. Kondisi kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	SDM	Pendidikan						JML	KET
		SD	SLTP	SLTA	SM/D. III	S.1/ D.IV	S.2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PNS	1		17	2	13	10	43	Tahun 2017
2	Non PNS		1	8		5		14	
Jumlah								57	
1	PNS	1		14	1	11	10	37	Tahun 2018
2	Non PNS		1	9		9		19	
Jumlah								56	
1	PNS	1		13	1	12	10	37	Tahun 2019
2	Non PNS		1	9		9		19	
Jumlah								56	
1	PNS	1		13	1	10	8	33	Tahun 2020
2	Non PNS		1	9		10		20	
Jumlah								53	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2017-2020

Tabel 2.2.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	SDM	Jenis Kelamin		JML	KET
		Pria	Wanita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PNS	21	22	43	Tahun 2017
2.	Non PNS	10	4	14	
Jumlah				57	
1.	PNS	18	19	37	Tahun 2018
2.	Non PNS	13	6	19	
Jumlah				56	
1.	PNS	19	18	37	Tahun 2019
2.	Non PNS	13	6	19	
Jumlah				56	
1.	PNS	19	14	33	Tahun 2020
2.	Non PNS	14	6	20	
Jumlah				53	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2017-2020

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar :

2.3.1 Kondisi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori:

a) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus).

b) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan serta berbagai program dan kegiatan yang terus dikembangkan dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia.

c) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk :

- (1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;
- (2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;
- (3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (cacat berat) sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
- (4) Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
- (5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

d) Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila, gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Sebagian keluaran (*output*) hasil penanganan kelompok sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tuna

sosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tuna sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

2.3.2 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu/kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

a) **Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin**

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam/sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin berupa : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatanannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

b) **Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.**

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa:

- (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Orsos dan PSM;
- (2) Orientasi / Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM berprestasi;
- (3) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM;
- (4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial;
- (5) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP;
- (6) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kabupaten;
- (7) Pemantapan Pelaksana WKSBM.

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial berupa:

- (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas);
- (2) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/TMB.

2.3.3 Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa :

a) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Secara geografis Kabupaten Karanganyar memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit.

Adapun langkah yang ditempuh yaitu dengan membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah melalui kegiatan :

- (1) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- (2) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini

- dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik;
- (3) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam.
- b) Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- Saat ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020*
1	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Na	Na	0,50
2	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	Na	Na	100,00
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	Na	Na	100,00
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	Na	Na	100,00
8	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	%	Na	Na	100,00
9	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	Na	Na	100,00
10	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	Na	Na	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020

Keterangan :

Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Karanganyar jumlahnya cukup besar.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
2. Munculnya dinamika sosial di masyarakat menambah beragam permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi prioritas tersendiri bagi bidang sosial khususnya dalam mengatasinya;
3. Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil;
4. Rendahnya partisipasi sosial masyarakat.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;
2. Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang-Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
3. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih integratif.

4. Dukungan infrastruktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.
5. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial di luar Panti Sosial.
6. Kerjasama stakeholders baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
7. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Karanganyar telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Disadari bahwa tantangan ke depan semakin berat, seiring dengan kompleksitas dan kuantitas PMKS juga turut meningkat sejalan perkembangan dan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu penanganan PMKS, jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, secara umum masih bisa dikatakan kurang mencukupi. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor	- Pelayanan sosial dasar PMKS di luar panti belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). - Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan. - PMKS non produktif dan terlantar dan korban bencana masih membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar. - Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan PMKS khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.
2.	Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).	Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	- PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). - Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan. - Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan penanganan PMKS.
3.	Masih terdapat <i>inxlusion error</i> dan <i>exlusion error</i> dalam Basis Data Terpadu (BDT)	Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.	Pelaksanaan verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) ditingkat Kecamatan belum berjalan optimal.

Dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan *stakeholder* terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. *Berjuang*

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. *Bersama*

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari

unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. *Memajukan*

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
4. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan *tagline* sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;

- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

c. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

d. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan mudahnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, maka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 5, pada misi ini peran serta Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui pengembangan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No	Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	- Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor. - Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) - Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.	- Pelayanan sosial dasar PMKS di luar panti belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). - Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan. - PMKS non produktif dan terlantar dan korban bencana masih membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar. - Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan PMKS khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui <i>Coorporate Social Responbility</i> (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha. - PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). - Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan. - Pelaksanaan verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) ditingkat Kecamatan belum berjalan optimal.	- Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar. - Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau NAWACITA maka Rencana Strategis Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian agenda:

- a. Agenda Tiga : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- b. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- c. Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa;
- d. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Sosial RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;
3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan ini ada dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Sasaran strategis Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, yaitu :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan, dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen, melalui indikator :
 - 1.1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar,
 - 1.2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator:
 - 2.1 Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya,
 - 2.2 Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Tugas Kementerian Sosial menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Fungsi Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin,
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu,
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial,
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial,
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial,
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemensos,
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah,
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial,
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Kebijakan Kementerian Sosial pada pembangunan Kesejahteraan sosial diarahkan untuk :

- (a) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
- (b) Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga)
- (c) Perluasan dana peningkatan akses pelayanan dasar
- (d) Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMN 2016-2021 difokuskan pada :

- (a) Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha (PSKS) terhadap penanganan PMKS
- (b) Meningkatkan persentase PMKS memperoleh bantuan sosial
- (c) Meningkatkan PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi
- (d) Meningkatkan jumlah penerima jaminan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial
- (e) Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana

Program pembangunan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Penanganan Fakir Miskin.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra Kementerian Sosial

No	Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong	- Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor. - Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.	- Pelayanan sosial dasar PMKS di luar panti belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). - PMKS non produktif dan terlantar dan korban bencana masih membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar. - Masih adanya exclusion dan inclusion error pada Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)	- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Korupsi yang dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I :
Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.

- 2. Misi II :
Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3. Misi III :
Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran Dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat Dan Membuka Ruang Usaha Baru.
- 4. Misi IV :
Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian misi III Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait untuk Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 3.4.
Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi

No	Renstra Dinas Sosial Prov	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan populasi PMKS dan meningkatkan peran PSKS dalam UKS	- Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor. - Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).	- Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan. - Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan PMKS khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui <i>Coorporate Social Responbility</i> (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha. - PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). - Belum optimalnya kualitas Sumber Daya	- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

No	Renstra Dinas Sosial Prov	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Manusia aparaturnya penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan. - Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan penanganan PMKS.	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, penanganan berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks Psikotik, Eks Narkoba, Tuna Laras dan Anak Nakal; pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana serta *shelter* bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

Tabel 3.5.
Telaah RTRW dan KLHS

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	RTRW - Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan - Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki - Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten.	- Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor. - Tingginya intensitas bencana alam berdampak pada rusaknya infrastruktur dan keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan/daerah rawan bencana.	- Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial; - Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil - Rendahnya partisipasi sosial masyarakat - Belum optimalnya strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) bagi masyarakat yang tinggal di kawasan/daerah rawan bencana.	- Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait. - Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha. - ya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. - Adanya panti-panti sosial dan PSKS.
2.	KLHS	- Alih fungsi lahan sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah - Pencemaran lingkungan berdampak menurunnya kualitas air bersih		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yaitu dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial antara lain :

- a. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- b. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;

- c. Masih kurang optimalnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berkomitmen untuk menurunkan angka PMKS melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka PMKS tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang utamanya difokuskan pada sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun serta ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Dengan diformulasikannya tujuan ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah ***“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial”***.

Dari pernyataan tujuan tersebut, kemudian dijabarkan kembali menjadi sasaran, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan pula tujuan juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

Untuk mencapai Tujuan Jangka Menengah tersebut diatas, maka Sasaran yang ingin dicapai dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Menurunnya populasi PMKS.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2021	2022	2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial	1. Menurunnya populasi PMKS	Persentase penurunan jumlah PMKS	0,40%	0,90%			
	2. Meningkatnya pelayanan SPM	Persentase cakupan pelayanan SPM			100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu Strategi yang tepat dan akurat guna mencapai hasil yang optimal untuk lima tahun kedepan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial	1. Menurunnya populasi PMKS	- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan keluarga dan kesejahteraan sosial serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. - Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam mengatasi ketidakberdayaan dan kesenjangan sosial serta sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PMKS. - Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	- Peningkatan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial . - Peningkatan pembinaan dan keterampilan bagi PMKS. - Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan sosial bagi PMKS. - Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS. - Peningkatan fungsi dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

	2. Meningkatnya Pelayanan SPM	- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Meningkatkan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	- Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran. - Peningkatan kualitas perencanaan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan SPM. - Peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur yang professional. - Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang handal dalam pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
--	-------------------------------	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Melalui arah kebijakan diperoleh cerita strategi melalui program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Indikasi rencana program dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Sosial Tahun 2020 :

1. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial dengan kegiatan meliputi:
 - a. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Sosial;
 - b. Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan Masyarakat Rawan Sosial;
 - c. Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan;
 - d. Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan meliputi:
 - a. Fasilitasi Penyantunan Anak dan Keluarga;
 - b. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
 - c. Fasilitasi Tuna Sosial;
 - d. Pengadaan peralatan bantu bagi penyandang disabilitas penerima layanan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di provinsi dan luar panti di kabupaten/kota.

B. Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Sosial Tahun 2021-2023 :

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota.
2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
 - b. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIVAIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
4. Program Penanganan Becana, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.
- 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

C. Program dan Kegiatan Rutin/Kesekretariatan Tahun 2021-2023 :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - b. Administrasi umum perangkat daerah;
 - c. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - d. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - e. Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - f. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), indikator kinerja, kelompok sasaran selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya kesejahteraan sosial			Persentase Penanganan PMKS	1.15%	1.50%		1.75%		2.00%		2.25%		2.50%		2.50%		Dinsos	Kab. Karanganyar
	Menurunnya populasi PMKS		Persentase penurunan jumlah PMKS	0%	0.40%		0.90%											
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	0.50%	1.664.530.000												
		- Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH)	Volume bantuan operasional untuk sekretariat UP-PKH	12 bulan	12 bulan	746.000.000												
		- Pembinaan Lanjut Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Anggota KUBE LKM yang dibina	100 orang	-	-												
		- Pendampingan KUBE KEMENSOS RI	Jumlah pendamping KUBE yang mendapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan	40 orang	65 orang	88.000.000												

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Pendampingan Penyaluran Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang disantuni	Jumlah Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang disantuni	5.666 orang	9.575 orang	109.750.000												
		- Biaya operasional Bantuan Sosial	Volume penyampaian bansos yang terlaksana	1 kegiatan	36 lokasi	20.000.000												
		- Paket Sembako kepada Fakir Miskin	Jumlah paket sembako yang diberikan kpd fakir miskin	625 paket	860 paket	170.000.000												
		- Kegiatan Bantuan Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	Volume kegiatan pemberdayaan Komda Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan	65.000.000												
		- Fasilitas Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	Sakti Peksos yang terfasilitasi	3 orang	3 orang	65.000.000												
		- Operasional Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal	Jumlah masyarakat kehabisan bekal yang dibantu	50 orang	45 orang	2.500.000												
		- Pelatihan kewirausahaan anak rawan sosial / anak terlantar	Jumlah anak purna bina panti asuhan yang dilatih	10 anak	5 anak	10.000.000												
		- Fasilitas Adopsi Anak	Jumlah anak yang teradopsi secara langsung	-	6 anak	25.500.000												
		- Fasilitas Lansia terlantar di luar panti	Jumlah Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	50 orang	75.900.000												
		- Fasilitas Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	5 orang	8.850.000												
		- Bantuan sosial Penyaluran Lansia	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial		4.000 orang	2.000.000.000												

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Bantuan sosial Penyaluran Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Jumlah anak yatim, piatu dan yatim piatu yang mendapatkan bantuan sosial		5.456 anak	2.820.000.000												
		- Bantuan sosial kepada Panti Asuhan/Lembaga/Yayasan/Orsos	Jumlah Panti Asuhan/Lembaga/Yayasan/Orsos yang mendapatkan bantuan sosial	17 PA/Lembaga/yayasan/Orsos	17 PA/Lembaga/yayasan/Orsos	330.000.000												
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	698.250.000												
		- Fasilitasi UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca	Volume kegiatan disabilitas yang terfasilitasi	4 kegiatan	6 kegiatan	400.000.000												
		- Bantuan sosial kepada Disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	15 orang	93,250.000												
		- Bantuan sosial kepada penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial	60 orang	65 orang	145.000.000												
		- Bantuan sosial kepada organisasi penyandang disabilitas	Jumlah organisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial	5 ormas	6 ormas	60.000.000												
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	100%	100%	10.000.000												

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100%													
		- Pemberdayaan satgas penanggulangan kemiskinan dan aksi sosial	Jumlah satgaskin dan aksos yang diberdayakan	177 orang	177 orang	20.000.000												
		- Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberdayakan	17 orang	17 orang	418.900.000												
		- Pembinaan karang taruna	Volume kegiatan karang taruna yang terfasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000												
		- Pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Volume kegiatan pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	3 kegiatan	3 kegiatan	20.000.000												
		- Bantuan Operasional TAGANA	Jumlah anggota TAGANA yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	34 orang	90 orang	50.000.000												
		- Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM)	Jumlah PSM/IPSM desa/kel yang mendapatkan pembinaan	-	50 orang	10.000.000												
		- Pembinaan dan peningkatan pilar-pilar partisipan sosial	Jumlah pilar-pilar partisipan sosial yang mengalami peningkatan kinerja dalam penanganan PMKS	-	120 orang	30.000.000												
		- Sosialisasi Relawan Pelopor Perdamaian	Jumlah anggota tenaga relawan pelopor perdamaian yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	-	50 orang	15.000.000												

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	144 jiwa	144.080.000												
		- Pendampingan korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah warga masyarakat korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	-	100 KK	750.000.000												
		- Bantuan Spontanitas	Jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan spontanitas	-	75 KK	150.000.000												
		- Kegiatan kearifan lokal dan keserasian sosial	Jumlah kelompok masyarakat, sanggar, organisasi kemasyarakatan yang menjaga kearifan lokal untuk meminimalisir konflik sosial	-	30 Kelompok	600.000.000												
		- Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bansos santunan kematian	-	145 jiwa	145.000.000												
		Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	- Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	-	-	0.50%	5.026.780.000										
			- Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	-		94.64%											

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GAJAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	-		100%											
		- Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Sosial	- Jumlah pendamping KUBE yang mendapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan - Volume kegiatan operasional program bantuan pemugaran RTLH dari KEMENSOS RI - Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pemahaman tentang program perlindungan dan jamsos - Volume basis data kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi - Terkoordinasikannya para pelaku program BPNT di Kab. Karanganyar - Jumlah TKSK yang diberdayakan - Jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan sosial - Jumlah KUBE yang mendapatkan bantuan sosial	- - - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	65 orang 1 kegiatan 300 orang 1 paket basis data 4 kegiatan 17 orang 40 KK 5 KUBE	1.901.700.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	-		144 jiwa											
			- Jumlah warga masyarakat korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	-	-		100 KK											
			- Jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan spontanitas	-	-		75 KK											
			- Jumlah kelompok masyarakat, sanggar, organisasi kemasyarakatan yang menjaga kearifan lokal untuk meminimalisir konflik sosial	-	-		30 kelompok											
			- Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bansos santunan kematian	-	-		145 jiwa											
		- Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	- Anggota KUBE LKM yang dibina	-	-	-	200 orang	485.000.000										
			- Jumlah satgaskin dan aksos yang diberdayakan	-	-		177 orang											
			- Volume kegiatan karang taruna yang terfasilitasi	-	-		1 kegiatan											
			- Volume kegiatan pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	-	-		3 kegiatan											

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRA M / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENAN GGUN GJAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Jumlah anggota WKSBM yang difasilitasi - Jumlah PSM/IPSM desa/kel yang mendapatkan pembinaan - Jumlah forum komunikasi pengurus karang taruna - Jumlah pilar-pilar partisipan sosial yang mengalami peningkatan kinerja dalam penanganan PMKS - Jumlah masyarakat yang terlayani melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) - Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi program-program kesejahteraan sosial	- - - - - -	- - - - - -		60 orang 177 IPSM 1 forum 100 orang 50 orang 300 orang											
		- Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolahan data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota	- Jumlah pengadaan alat pendingin ruang data - Jumlah pengadaan PC dan Printer - Jumlah pengadaan Laptop - Jumlah pengadaan meubelair	-	-	-	1 unit 2 paket 3 unit 3 paket	75.000.000										
		Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100%	7.151.340.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Persentase AnakTerlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Persentase Lanjut UsiaTerlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial - Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial - Prosentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	-	-		100%											
		- Fasilitasi Penyantunan Anak dan Keluarga	- Volume penyantunan Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu - Volume kegiatan pemberdayaan Komda Lansia - Sakti Peksos yang terfasilitasi	-	-	-	2 keg	5.670.500.000										
				-	-		1 lembaga											
				-	-		3 orang											

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Jumlah anak yang teradopsi secara langsung - Jumlah panti asuhan/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang dibangun dan diberikan bantuan - Jumlah anak purna bina panti asuhan yang dilatih - Jumlah masyarakat rawan sosial dan difabel yang dilatih dan diberikan bantuan - Jumlah Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial - Jumlah anak yatim, piatu dan yatim piatu yang mendapatkan bantuan sosial - Jumlah Panti Asuhan/Lembaga/Yayasan/Orsos yang mendapatkan bantuan sosial	-	-	-	7 anak											
		- Fasilitasi Rehabilitasi Sosial	- Volume kegiatan disabilitas yang terfasilitasi	-	-	-	6 kegiatan	660.500.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Jumlah eks penyandang penyakit kronis yang dibina - Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial - Jumlah organisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial	- - - -	- - - -		10 orang 15 orang 65 orang 6 ormas											
		- Fasilitasi Tuna Sosial	- Jumlah anak jalanan yang dilatih - Jumlah PGOT yang ditangani - Jumlah eks penyandang penyakit kronis yang dibina dan diberikan bantuan - Jumlah eks napi yang memperoleh bimbingan dan bantuan stimulan - Jumlah ODHA yang mendapatkan bimsos dan bantuan stimulan - ODGJ yang terlayani - Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	- - - - - - -	- - - - - - -	-	20 orang 83 PGOT 100 orang 20 orang 50 orang 100 orang 8 orang	525.840.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Pengadaan peralatan bantu bagi penyandang disabilitas penerima layanan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di provinsi dan luar panti di kabupaten/kota	- Jumlah pengadaan alat bantu kursi roda - Jumlah pengadaan alat bantu dengar - Jumlah pengadaan alat bantu kruk	-	-	-	100 unit 10 unit 10 unit	294.500.000										
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya di bidang kesejahteraan sosial	100%	100%		100%											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	534.000.000	100%	621.500.000										
		- Penyediaan jasa surat menyurat	Volume pelayanan pengiriman surat	12 bulan	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000										
		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Volume pengelolaan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	130.000.000	12 bulan	130.000.000										
		- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Volume penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.	28 unit/tahun	50 unit/tahun	33.000.000	50 unit/tahun	30.000.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Volume jasa kebersihan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000										
		- Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	70 macam	44 macam	20.000.000	44 macam	0.000.000										
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000										
		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	11 macam	9 macam	10.000.000	10 macam	10.000.000										
		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Volume bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 macam	5 macam	7.500.000	5 macam	8.000.000										
		- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah konsumsi rapat dinas/penataran/penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya yang disediakan	750 orang	524 orang	36.000.000	524 orang	36.000.000										
		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.	12 bulan	12 bulan	110.000.000	12 bulan	200.000.000										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5.390,000.000	100%	1.838,000.000										
		- Pembangunan gedung kantor	Volume pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar	1 paket	1 paket	4.700,000.000	-	-										
		- Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	-	28 unit roda 2	360.000.000	1 unit roda 4	250.000.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRA M / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENAN GGUN GJAWA B	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Pengadaan Komputer	- Jumlah Komputer PC yang terbeli - Jumlah Laptop yang terbeli Jumlah Printer yang terbeli	-	2 unit 1 unit 2 unit	15,000.000	5 unit 5 unit 5 unit	95,000.000										
		- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Volume pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	1 paket	45,000.000	1 paket	300,000.000										
		- Pengadaan Mebelair	Volume pengadaan mebelair kantor	-	1 paket	50,000.000	1 paket	120,000.000										
		- Pegadaan Peralatan Kantor	Volume pengadaan peralatan kantor	-	1 paket	25,000.000	1 paket	25,000.000										
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lokasi bangunan yang dipelihara	2 lokasi	3 lokasi	40,000.000	3 lokasi	178,000.000										
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Volume kendaraan dinas yang terpelihara	8 mobil, 37 spd motor	8 mobil, 37 spd motor	155,000.000	8 mobil, 65 spd motor	175,000.000										
		- Pembangunan tempat parkir dan pagar kantor	Volume kegiatan pembangunan yang terlaksana	-	-	-	1 paket	250,000.000										
		- Pembuatan dan penataan interior ruangan	Volume ruangan yang dibuat interiornya	-	-	-	3 ruang	445,000.000					99					
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	115,000.000	100%	125,000.000										
		- Peningkatan kompetensi aparatur	Volume kegiatan peningkatan kompetensi bagi pegawai dan pilar-pilar kesos	-	1 paket	100,000.000	1 paket	110,000.000										
		- Pendidikan dan pelatihan non formal	Volume kegiatan pendidikan dan pelatihan non formal bagi pegawai	1 tahun	1 tahun	15,000.000	1 tahun	15,000.000										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	225,000.000	100%	195,000.000										
		- Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Volume pengelolaan keuangan dan pelaporan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	175,000.000	12 bulan	180,000.000										
		- Penyusunan Renstra OPD	Dokumen Renstra serta review Renstra Dinas Sosial Kab. Karanganyar yang tersedia	-	1 dokumen	50,000.000	1 dokumen	15,000.000										
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	-	80%	20,000	-	-										
		- Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen UKL/UPL yang tersedia	-	1 dokumen	20,000	-	-										
	Meningkatnya Pelayanan SPM		Persentase cakupan pelayanan SPM						100%		100%		100%		100%			
		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, KAT, dan Lainnya						100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan PMKS						100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000		
		- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kegiatan Pemberdayaan TKSK						17 orang	380.000.000	17 orang	400.000.000	17 orang	440.000	17 orang	440.000.000		
		-																
			Kegiatan Pembinaan dan Monitoring KUBE						120 KUBE		120 KUBE		120 KUBE		120 KUBE			
			Kegiatan Pembinaan dan Monitoring RTLH						50 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
			Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial						550 orang		550 orang		550 orang		550 orang			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial						100%	70.000.000	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	93.500.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepalawanan dan rasa kesetiakawanan						3 kegiatan	70.000.000	3 kegiatan	85.000.000	4 kegiatan	93.500.000	4 kegiatan	93.500.000		
		- Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial						100%	2.900.000.000	100%	3.250.000.000	100%	3.877.500.000	100%	3.877.500.000		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tertanganinya PMKS						5.971 Orang, 17 Lembaga	2.900.000.000	5.971 Orang, 17 Lembaga	3.250.000.000	5.971 Orang, 17 Lembaga	3.877.500.000	5.971 Orang, 17 Lembaga	3.877.500.000		
		- Penyediaan Alat Bantu	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu menuju terwujudnya kemandirian						120 orang	300.000.000	120 orang	325.000.000	120 orang	357.500.000	120 orang	357.500.000		
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti sosial/RSJD/RSUD						100 orang	150.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	220.000.000	100 orang	220.000.000		
		-	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti						10 orang		10 orang		10 orang		10 orang			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Jumlah penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial						10 orang		10 orang		10 orang		10 orang			
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						9 anak	2.450.000.000	9 anak	3.000.000.000	9 anak	3.300.000.000	9 anak	3.300.000.000		
			Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						70 orang		70 orang		70 orang		70 orang			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Jumlah lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan/organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan						17 PA/Lembaga/Yayasan/Organisasi		17 PA/Lembaga/Yayasan/Organisasi		17 PA/Lembaga/Yayasan/Organisasi		17 PA/Lembaga/Yayasan/Organisasi			
			Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum						12 anak		12 anak		12 anak		12 anak			
			Terlaksananya pendampingan bansos kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, dan lansia						5640 orang		5640 orang		5640 orang		5640 orang			
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			
			Jumlah bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas						100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang dibina						100%	300.000.000	100%	335.000.000	100%	368.500.000	100%	368.500.000		
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas						7 kegiatan	180.000.000	7 kegiatan	200.000.000	7 kegiatan	220.000.000	7 kegiatan	220.000.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		NAPZA																
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya kegiatan eks penyandang penyakit kronis yang dibina						15 orang	120.000.000	15 orang	135.000.000	15 orang	148.500.000	15 orang	148.500.000		
		- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, KAT, dan Lainnya						100%	1.150.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.331.000.000		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran						100%	1.150.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.331.000.000		
		- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Petugas PMK						177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	635.000.000	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	670.000.000	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	737.000.000	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	737.000.000		
		-	Termotivasinya penerima RTLH dalam membangun rumahnya untuk kehidupan yang layak						100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Berkurangnya Beban Pengeluaran KPM dalam hal pemenuhan gizi (pangan) keluarga						26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)		26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)		26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)		26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)			
		- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan Masyarakat Rawan Sosial						1 paket	480.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	550.000.000	1 paket	550.000.000		
			Terbantunya kebutuhan pangan untuk fakir miskin						2100 paket		2100 paket		2100 paket		2100 paket			
			Pendampingan program keluarga harapan (PKH)						1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
			Pemberian bantuan/Fasilitasi masyarakat kehabisan bekal						100 jiwa		100 jiwa		100 jiwa		100 jiwa			
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terbinanya Anggota KUBE						240 orang	35.000.000	240 orang	40.000.000	240 orang	44.000.000	240 orang	44.000.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Program Penanganan Bencana	Cakupan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial						100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	132.000.000		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial						100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	132.000.000		
		- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Fasilitasi terhadap korban bencana alam dan sosial						150 KK	100.000.000	150 KK	120.000.000	131 KK	150.000.000	131 KK	150.000.000		
		- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan								100%	103.800.000	100%	114.180.000	100%	114.180.000		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan								100%	103.800.000	100%	114.180.000	100%	114.180.000		
		- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Volume bahan/material perawatan makam yang tersedia								20 macam	75.000.000	20 macam	82.500.000	20 macam	82.500.000		
		-	Jumlah tenaga tukang yang terbayar								5 orang/keg		5 orang/keg		5 orang/keg			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN GJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang terbayar								4 orang	28.800.000	4 orang	31.680.000	4 orang	31.680.000		
		- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	372.000.000	100%	390.000.000	100%	429.000.000	100%	429.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						100%	372.000.000	100%	390.000.000	100%	429.000.000	100%	429.000.000		
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Volume pelayanan pengiriman surat						12 bulan	18.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	22.000.000		
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana komunikasi yang dikelola						12 bulan	115.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	132.000	12 bulan	132.000.000		
		-	Jumlah sarana sumber daya air yang dikelola						12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		-	Jumlah sarana listrik yang dikelola						12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Volume penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.						28 unit/tahun	66.000.000	28 unit/tahun	70.000.000	28 unit/tahun	77.000.000	28 unit/tahun	77.000.000		
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli						35 jenis	173.000.000	35 jenis	180.000.000	35 jenis	198.000.000	35 jenis	198.000.000		
		-	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan honorariumnya.						8 orang/tahun		8 orang/tahun		8 orang/tahun		8 orang/tahun			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						100%	478.500.000	100%	508.000.000	100%	558.800.000	100%	558.800.000		
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor						44 macam	55.000.000	44 macam	60.000.000	44 macam	66.000.000	44 macam	66.000.000		
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia						4 jenis	20.000.000	4 jenis	23.000.000	4 jenis	25.300.000	4 jenis	25.300.000		
		-	Jumlah barang penggandaan yang tersedia						8000 lembar		8000 lembar		8000 lembar		8000 lembar			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia						9 macam	23.500.000	9 macam	25.000.000	9 macam	27.500.000	9 macam	27.500.000		
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi rapat dinas/penataran/penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya yang disediakan						750 orang	50.000.000	750 orang	50.000.000	750 orang	55.000.000	750 orang	55.000.000		
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar negeri.						12 bln	280.000.000	12 bln	300.000.000	12 bln	330.000.000	12 bln	330.000.000		
		- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya pelayanan sistem berbasis elektronik						1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000		
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor						100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	33000.000		
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli						3 laptop	30.000.000	3 laptop	30.000.000	3 laptop	33.000.000	3 laptop	33.000.000		
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah						100%	285.000.000	100%	311.000.000	100%	342.100.000	100%	342.100.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume bahan/material pengecatan yang tersedia						6 macam	135.000.000	6 macam	150.000.000	6 macam	165.000.000	6 macam	165.000.000		
		-	Jumlah tenaga tukang pengecatan yang terbayar						5 orang		5 orang		5 orang		5 orang			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Volume kendaraan dinas yang terpelihara						73 unit	150.000.000	73 unit	161.000.000	73 unit	177.100.000	73 unit	177.100.000		
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan						100%	4.131.531.000	100%	4.131.531.000	100%	4.131.531.000	100%	4.131.531.000		
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN						14 bulan	4.131.531.000	14 bulan	4.131.531.000	14 bulan	4.131.531.000	14 bulan	4.131.531.000		
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan						100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	137.500.000	100%	137.500.000		
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Volume penyediaan ATK untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan						11 macam	105.000.000	11 macam	110.000.000	11 macam	121.000.000	11 macam	121.000.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		-	Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan,barang dan perencanaan yang terbayar						4 orang / 12 bulan		4 orang / 12 bulan		4 orang / 12 bulan		4 orang / 12 bulan			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen review Renstra yang tersedia						1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500	1 dokumen	16.500.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 merupakan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dikemukakan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Indikator RPJMD									
1.	Persentase Penanganan PMKS	Jumlah PMKS ditangani tahun n : Jumlah PMKS tahun n X 100%	%	1,02	1,15	1,50	1,56	2	2,25	2,5
2.	Prosentase Cakupan Pelayanan SPM	Jumlah pelayanan SPM : Target capaian SPM tahun n X 100%	%	Na	Na	Na	Na	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar Urusan Sosial

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandanganpengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhandasamanya di luar panti , dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis X 100 %	%	100	100	100	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhandasamanya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2018-2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua Pimpinan dan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2018-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 yaitu ***“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial”*** yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 harus dijadikan acuan bagi unit-unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.